



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 1999 SERI B NO. 5

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Penyedotan Kakus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA  
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengurut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Penyedotan kakus adalah penyedotan kakus yang dilakukan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pembukaan, penyedotan, penutupan kembali, pengangkutan dan pengolahan akhir di unit IPLT ;

h. Retribusi ....

- h. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus;
- i. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pemanfaatan pelayanan penyedotan kakus.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus;

#### Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas pelayanan penyedotan kakus.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan jarak tempuh.

### BAB V

#### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jarak tempuh kurang dari 10 km . Rp.40.000,-/m<sup>3</sup>
- b. Jarak tempuh 10 s/d 20 km ..... Rp.50.000,-/m<sup>3</sup>

c. Jarak ....

- c. Jarak tempuh lebih dari 20 km .. Rp.60.000,-/m<sup>3</sup>
- d. Orang pribadi atau badan yang membuang langsung ke instalasi pengolah tinja Rp.20.000,-/m<sup>3</sup>
- e. Apabila volume tinja yang dieedot kurang dari 1 m<sup>3</sup> diperhitungkan sama dengan 1 m<sup>3</sup>.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Daerah dipungut di Wilayah Daerah pada tempat pelayanan penyedotan kakus.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan dilakukan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang.

(3) Surat ....

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB XIV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 18

Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### BAB XV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terutang.

(2) Tindak ....



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh ....

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan Penyampaian hasil penyidikannya Kepada Peruntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di J e p a r a  
pada tanggal 3 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

KETUA,



*[Signature]*  
GATOT KISWORO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J E P A R A



*[Signature]*  
SOENARTO

Dianahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33 - 453 tanggal  
11 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara  
pada tanggal 17.5.1999. No. 7. Tahun 1999  
No. 5.....  
Sekretaris Wilayah / Daerah  
*[Signature]*  
HENDRO MARTONO  
Pembina  
NIP. 010072015.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, oleh karena itu pengaturan Retribusi Daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Berhubung dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur Retribusi Penyedotan Kakus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9 ayat (5) : Cukup jelas  
huruf d

Pasal 9 ayat (5)  
huruf e

- Apabila volume tinja yang disedot kurang dari 1 m<sup>3</sup> diperhitungkan sama dengan 1 m<sup>3</sup>.
- Apabila volume tinja yang disedot 1,1 m<sup>3</sup> sampai dengan 2 m<sup>3</sup> diperhitungkan sama dengan 2 m<sup>3</sup>.

- Apabila .....

- Apabila volume tinja yang disedot 2,1 m<sup>3</sup> sampai dengan 3 m<sup>3</sup> diperhitungkan sama dengan 3 m<sup>3</sup>, dan seterusnya.

Pasal 10 s.d. 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib Retribusi, atau menghimpun data objek Retribusi dan subyek Retribusi. kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 13 ayat (1) : yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis dan kartu langganan atau kuitansi.

Pasal 13 ayat (2) s/d pasal 22 : Cukup jelas.